

MENDADAK BAHILIL COPOT DIRJEN MIGAS

Sepakan terakhir kegaduhan bertubi-tubi menyeruak dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terbaru, Bahlil Lahadalia --Menteri ESDM-- ternyata telah mencopot Achmad Muchtasyar dari jabatan yang belum genap sebulan didudukinya yaitu sebagai Direktur Jendral Migas (Dirjen Migas). Sebelumnya, publik disajikan penggeledahan Kantor Ditjen Migas pada Senin (10/02/2025) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus yang sedang diselidiki adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Mundur ke awal Februari, aturan soal liquid petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) atau elpiji bersubsidi memicu protes dan kepanikan masyarakat. Kala itu, Bahlil melarang penjualan 'si melon' di pengecer, yaitu warung atau toko kelontong. Alasannya agar subsidi dan harga terkendali. Walhasil LPG hijau tersebut hanya bisa dibeli di pangkalan yang memicu kelangkaan stok, bahkan hilang dari pasar. Endingnya, Presiden Prabowo Subianto membatalkan aturan tersebut. Kementerian ESDM pun akhirnya mengubah skenario pengendalian subsidi dengan menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan. Namun keresahan rakyat kembali muncul, saat Bahlil berencana menertibkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi.

Baca Hal 11....

DUDUK PERKARA KASUS DUGAAN KORUPSI DITJEN MIGAS ESDM



Kasus ini bermula pada 2018 ketika diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.



Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengutamakan minyak mentah hasil produksi dalam negeri untuk kemudian diolah di kilang perusahaan sebelum melakukan impor. Di sisi lain, KKKS swasta juga diwajibkan menawarkan bagian minyak mentahnya kepada PT KPI sebelum melakukan ekspor.



Apabila penawaran dari swasta ditolak oleh Pertamina, maka hal itu dapat digunakan perusahaan pelat merah ini untuk mengajukan rekomendasi ekspor. Akan tetapi, dalam praktiknya, Kejagung menduga adanya upaya PT KPI dan KKKS swasta untuk menghindari kesepakatan jual beli minyak mentah tersebut.



Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISJ dan/atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, mulai di situ ada unsur perbuatan melawan hukumnya.



Tindakan menghindari kesepakatan jual beli tersebut telah merugikan negara. Pasalnya, minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang seharusnya bisa diolah di Kilang Pertamina malah harus tergantikan dengan minyak mentah hasil impor.



Satu Payung di Bawah Guyuran Hujan

Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan istrinya, Emine Erdogan, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa (11/2/2025) sekitar pukul 18.28 WIB. Berada di bawah satu payung yang sama, Prabowo memperkenalkan Erdogan kepada Menteri Pertahanan Sja'frie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Erdogan sebelumnya telah berkunjung ke Malaysia dan akan menuju Pakistan sesuai kunjungannya di Indonesia. (afp)

Indeks Persepsi Korupsi Naik 3 Poin, Transparency International Indonesia: Tak Signifikan

JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) mengatakan peningkatan skor tiga poin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dari 34 menjadi 37 tidak berarti signifikan.

Dibandingkan skor IPK tahun 2024 dengan sepuluh tahun ke belakang yang hanya meningkat satu poin. Pada 2015, skor IPK Indonesia berada di angka 36.

"Dulu 2015 diawali dengan angka 36 dan sekarang 37, 10 tahun artinya kita hanya naik 1 poin," ujar Deputy Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Hal itu berbeda apabila membandingkan skor IPK periode 2005-2014 yang meningkat sebanyak 12 poin. Pada 2005, skor IPK Indonesia berada di angka 22.

Dengan keadaan tersebut, Wawan mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dan parlemen di Indonesia.

"Meskipun kalau kita bilang angkanya memang naik ya skornya gitu atau rankingnya jauh lebih bagus, sehingga dalam hal ini pemerintah dan parlemen perlu terus menjaga partisipasi publik," ucap Wawan.

"Artinya, meaningful participation bukan lagi artifisial gitu ya di berbagai sektor termasuk tadi di sektor lingkungan, di sektor energi itu penting, dan menjaga ruang sipil yang aman bagi tumbuhnya demokrasi yang adil," ucap dia menambahkan.

Menurut Wawan, demokrasi yang substansial menjadi prasyarat bagi pemberantasan korupsi yang terarah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Skor CPI Indonesia berada di angka 37, lolos dari titik nadir di mana dua tahun sebelumnya berada di angka 34. Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara yang dilibatkan.

Beberapa negara yang mendapat skor sama dengan Indonesia yaitu Argentina, Ethiopia, Maroko dan Lesotho. "Hari ini, CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan skor 37 dan rankingnya 99. Artinya, terjadi peningkatan tiga poin dari tahun 2023 ke 2024," kata Wawan.

Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).

Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 84 (naik 1 poin), Malaysia 50 (stagnan), Timor Leste 44 (naik 1 poin) dan Vietnam 40 (turun 1 poin).

Indonesia membalap Thailand yang pada tahun ini mengalami penurunan skor 1 poin dengan IPK 34.



(Ilustrasi) Sejumlah aktivis melakukan aksi teatral saat unjuk rasa di depan Gedung KPK. (Dok)

Sementara itu, di bawah Indonesia ada Laos yang memperoleh skor IPK 33 (naik 5 poin), Filipina 33 (turun 1 poin), Kamboja 21 (turun 1 poin) dan Myanmar 16 (turun 4 poin).

"Mayoritas negara-negara di ASEAN mengalami penurunan skor," ungkap Wawan. Secara global, Denmark dengan IPK 90 berada di puncak. Sudah empat tahun Denmark menempati posisi teratas.

Diikuti oleh Finlandia dengan skor 88 (naik 1 poin), Singapura 84 (naik 1 poin), Selandia Baru dengan skor IPK 83 (turun 2 poin), Luksemburg 81, Norwegia dengan skor 84 (naik 3 poin) dan Switserland dengan skor 81 (stagnan).

Selanjutnya Swedia (80), Belanda (78) serta Australia, Iceland dan Irlandia yang memperoleh skor 77.

Sementara itu, sepuluh negara dengan capaian CPI terendah adalah South Sudan (8), Somalia (9), Venezuela (10), Suriah (12), Libya (13), Yemen (13), Equatorial Guinea (13), Eritrea (13), Nikaragua (14), Korea Utara (15) dan Sudan (15).

"Masuk dalam negara-negara nondemokratis dan negara-negara yang menurut para ahli adalah menuju pada negara yang gagal," ucap Wawan.

Setidaknya terdapat sembilan sumber data yang menjadi indikator dalam CPI tahun 2024. "Yang cukup jadi anomali setelah dua tahun absen, World Economic Forum EOS hadir di 2024 dengan angka signifikan (61). Ini merupakan angka tertinggi juga. Biasanya hanya mencapai angka di kisaran 50-an," kata Wawan.

Kemudian Varieties of Democracy Project dengan poin 22 (turun 3 poin), IMD World Competitiveness Yearbook (45, naik 5 poin), Bertelsmann Foundation Transform Index (39, naik 2 poin), PERC Asia Risk Guide (38, naik 10 poin), Economist Intelligence Unit Country Ratings (35, turun 2 poin), PRS International Country Risk Guide (33, naik 1 poin).

Selanjutnya Global Insight Country Risk Ratings (32, turun 15 poin) dan World Justice Project- Rule of Law

Index (26, turun 2 poin).

Aspek yang diukur dalam CPI antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif, hingga perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi serta akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik.

Sedangkan aspek yang tidak diukur antara lain persepsi atau pengalaman warga negara terhadap korupsi, penipuan pajak, aliran keuangan terlarang, hingga pencucian uang dan perekonomian dan pasar informal.

KPK Sebut Tambah Percaya Diri

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi kenaikan skor Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 dibanding tahun lalu yang dirilis Transparency International (TI). Menurut Setyo, kenaikan tersebut membuat Indonesia, termasuk KPK, tambah percaya diri.

"Sedikit banyak itu menimbulkan sebuah kepercayaan diri untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah, dan khususnya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

TI menempatkan Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37 pada pengukuran CPI 2024 bersama empat negara lainnya, yakni Argentina, Ethiopia, Leshoto, dan Maroko. Bagi Indonesia, skor dan peringkat tahun ini meningkat dibanding CPI 2023, yaitu 34 poin di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.

"Tentu kita semuanya mensyukuri ada perbaikan dari tahun sebelumnya daripada tahun ini. Meskipun dengan segala sesuatu, mungkin dipengaruhi adanya satu sisi yang berpengaruh terhadap peningkatan ini," ujar Setyo.

Lebih lanjut, Setyo mengajak

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 2024

Skor Tinggi

- Denmark (90)
- Finlandia (88)
- Singapura (84)
- Selandia Baru (83)
- Norwegia, Luksemburg, Swiss (81)

Skor Tinggi

- Korea Utara-Sudan (15)
- Nikaragua (14)
- Libya-Yaman-Guinea Khatulistiwa-Eritrea (13)
- Suriah (12)
- Venezuela (10)

semua elemen pemerintahan, baik kementerian atau lembaga, untuk sama-sama mencermati skor CPI tahun ini. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga dinilai memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang jasa maupun pemborosan anggaran.

Apalagi, sambung Setyo, Indonesia memiliki cita-cita menuju masa keemasan pada 2045. Baginya, upaya memperbaiki bangsa menuju Indonesia Emas 2045 perlu dilakukan sejak dini, tak perlu menunggu sampai 2035 atau 2040.

"Dari sekarang kita sama-sama supaya IPK kita semakin bagus dan ini pengaruhnya terhadap investasi, perekonomian, perdagangan. Apalagi ada keinginan dari pemerintah, khususnya Presiden untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di angka delapan persen," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda Orin Gusta Andini menilai pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan stagnan atau berjalan di tempat.

Orin mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi yang hanya naik 3 poin itu menunjukkan belum ada upaya berarti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Itu menunjukkan bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia stagnan, tapi hal itu wajar saja karena memang kita lihat cara-cara pemberantasan korupsi saat ini dari lembaga yg bekerja, seperti KPK yang kita tidak bisa berharap banyak," kata Orin. (wid,rls,ant/dya)

Pakai Tatib DPR Terbaru, DKPP Jadi Lembaga Pertama yang Dievaluasi



DKPP saat menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 30-PKE-DKPP/1/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025). (dok. DKPP)

JAKARTA - Komisi II Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menerapkan aturan baru tata tertib DPR, yaitu kewenangan untuk mengevaluasi lembaga negara. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi lembaga yang pertama kali dievaluasi.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan komisinya sudah mengevaluasi keberadaan DKPP. Ia mengatakan ada sejumlah evaluasi terhadap DKPP, salah satunya karena DKPP menerapkan prinsip mendahulukan untuk menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepala daerah yang diadukan ke lembaga itu, padahal penetapan hasil pilkada yang ditangani oleh KPU bersangkutan tengah diadukan ke Mahkamah Konstitusi melalui sengketa perselisihan hasil pilkada.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan DKPP sebagai peradilan etik penyelenggara pemilu seharusnya tidak memberikan keputusan terlebih dahulu pada persoalan pilkada yang tengah diproses di Mahkamah Konstitusi. Namun Rifqi enggan menyebut lokasi pemilihan kepala daerah yang menjadi sorotan Komisi II DPR.

"Menurut kami ini pernyataan yang agak fatal karena peradilan etik dengan mahkamah konstitusi itu dua hal yang berbeda," kata Rifqi saat ditemui usai menggelar rapat tertutup dengan DKPP di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Menurut Rifqi, jika DKPP memberikan keputusan terlebih dahulu dibandingkan putusan Mahkamah Konstitusi akan berpotensi menimbulkan fitnah terhadap

penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut.

Dalam dokumen yang beredar, salah satu landasan Komisi II DPR memanggil DKPP adalah Pasal 228A ayat (1) dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Aturan baru tata tertib itu baru dibuat DPR, pekan lalu.

Pasal 228A tersebut mengatur kewenangan DPR yang dapat mengevaluasi secara berkala pimpinan lembaga negara yang penempatannya lewat DPR. Hasil evaluasi berupa rekomendasi itu bersifat mengikat, yang akan diberikan oleh komisi kepada pimpinan DPR. Lalu pimpinan DPR akan melanjutkannya ke lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi rekomendasi tersebut.

Rifqi mengatakan, hasil evaluasi dari Komisi II DPR akan segera diserahkan ke pimpinan DPR. Setelah itu, kata dia, keputusan selanjutnya akan diambil oleh pimpinan DPR.

Di samping urusan tersebut, kata Rifqi, Komisi II DPR mengevaluasi berbagai persoalan penting lainnya di DKPP. Pertimbangan tersebut yang membuat Komisi II Bidang Pemerintahan menggelar rapat dengan DKPP secara tertutup.

"Sebagai Ketua Komisi II DPR saya harus menjaga harkat martabat mitra kerja saya," kata dia.

Rifqi menyoroti belum adanya sistem yang transparan dan terbuka dalam persidangan etik di DKPP. Selain itu, ia mengatakan ada evaluasi soal manajemen, pengaduan, pemeriksaan, dan persidangan di DKPP.

Menurut dia, ada sejumlah pengaduan yang sudah sangat lama masuk ke DKPP, tapi lembaga tersebut

tidak segera menyidangkannya. Di sisi lain, kata dia, ada juga pengaduan yang baru masuk ke DKPP, tapi lembaga ini justru cepat menyidangkan dan memutus perkaranya,

Bantahan DKPP

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hedy Lugito membantah tuduhan bahwa lembaganya mendahulukan untuk menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu yang penetapan hasil pemilihan kepala daerahnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Hedy mengatakan DKPP menangani semua perkara penyelenggara pemilu sesuai dengan urutan perkara yang masuk.

"Saya enggak paham keputusan yang mana, ya. Ini kan semuanya kami jalani sesuai dengan urutan perkara (yang) masuk. Itu saja," kata Hedy yang ditemui usai rapat tertutup dengan Komisi II DPR di Kompleks DPR, Jakarta.

Hedy mengatakan hingga saat ini masih ada 167 perkara yang ditangani oleh DKPP. Perkara itu mencakup dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2024, pemilihan kepala daerah 2024, dan non-tahapan. Ia mengatakan DKPP sudah menjadwalkan persidangan semua perkara tersebut hingga Mei mendatang.

Hedy melanjutkan, saat rapat tertutup dengan Komisi II DPR, mereka membahas evaluasi secara keseluruhan. Ia mengatakan tidak ada kasus tertentu yang menjadi sorotan Komisi II dalam rapat tersebut. "Pilkada secara keseluruhan. Selama periode DKPP sampai sekarang, (selama) dua tahun," kata dia. (wid, rls,

PASAL BARU DALAM TATIB DPR TERKAIT EVALUASI PEJABAT PUBLIK

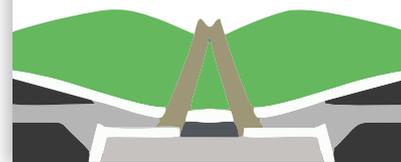
Pasal 228 A

Ayat (1)
Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud Pasal 227 ayat (2) DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Ayat (2)
Hasil evaluasi yang sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

PEJABAT PUBLIK YANG DIPILIH DPR

- KPK: Pimpinan KPK termasuk Dewan - Pengawas KPK
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Komisi Yudisial (KY)
- Mahkamah Agung (MA)
- Hakim Agung
- Mahkamah Konstitusi (MK): Namun perlu menjadi catatan karena tidak seluruh hakim MK dipilih melalui DPR, karena ada hakim MK yang merupakan unsur dari Presiden dan unsur MA. Total ada 3 hakim MK yang merupakan unsur DPR.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Gubernur BI
- Hakim Agung
- Panglima TNI
- Kepala Staf Angkatan (TNI AD, AL dan AU)
- Kepala BIN
- Kapolri
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)



Baru 600 RS Terapkan KRIS BPJS Kesehatan, Juni Ditargetkan Semua Terpenuhi

JAKARTA - Pemerintah telah menargetkan seluruh rumah sakit di Indonesia selesai mengimplementasikan kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti kelas rawat inap 1,2,3 BPJS Kesehatan per Juni 2025.

"Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah mulai implementasi KRIS," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Budi mengatakan, dari total 3228 rumah sakit atau RS yang ada di Indonesia, hanya ada 115 RS yang pemerintah tidak masukkan ke dalam daftar RS yang wajib mengimplementasikan KRIS, tanpa dijelaskan alasannya oleh Budi.

Saat ini dari 2.766 RS yang telah dilakukan validasi oleh Dinas Kesehatan masing-masing Pemprov dari total 3.116 RS, baru 600 RS yang telah menyelesaikan implementasi KRIS sesuai 12 standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Hasil validasinya jadi 600 sudah selesai dari 2,766," katanya. "Nah ini setengah-setengah lah swasta lebih banyak sedikit dan ada RS pemerintah," ucap Budi.

Pada kesempatan itu, Budi juga kembali menekankan bahwa KRIS itu sebenarnya sebatas penerapan standar minimal layanan bagi masyarakat, bukan untuk menyeragamkan kelas layanan.

"Jadi tujuan utamanya bukan dari sisi kelas tapi layanan kesehatannya minimal sama dong dan standarnya terpenuhi dan ada 12 standar kita kasih enggak semuanya sulit," tegas Budi.

Budi mengatakan, program KRIS itu hanya meminta setiap RS yang ada di Indonesia memberikan 12 standar layanan di tiap-tiap ruang rawat inapnya, supaya masyarakat yang menjadi pasien terpenuhi hak-hak dasarnya secara merata.

"Ada mungkin yang agak memerlukan afford tapi menurut kami manusiawi adalah pasang kamar mandi di dalam jadi kamar mandinya enggak usah di luar karena kan pasien sakit kalau bisa kamar mandinya dalam ruangan tempat tidur mereka seperti hotel kan kamar mandinya gak sharing di luar," tutur Budi.

Budi menjelaskan, dari total 12 kriteria KRIS yang telah ditetapkan pemerintah, terdapat 4 kriteria yang paling sulit dipenuhi RS, yakni kamar mandi harus bisa dilalui kursi roda, kelengkapan nurse call dan stop kontak, outlet oksigen setiap tempat tidur, dan ketersediaan kamar mandi dalam ruangan.

Untuk kamar mandi yang dapat dilalui kursi roda paling mendominasi belum diterapkan setia RS di dalam negeri, yakni porsinya mencapai 49%. Budi mengatakan, ini karena



Salah satu kamar rawat inap yang berada di RSUD ASA Kota Depok. (dok)

pembuatan pintu kamar mandi di RS mayoritas berbentuk kecil.

"Jadi ternyata banyak RS bikin pintu kamar mandi kecil sekali, padahal itu ada standarnya. Jadi kalau orang pakai kursi roda dimasuki itu ada standarnya, kalau enggak dia terpaksa di tuntun jalan padahal jalannya sudah susah," tegas Budi.

Adapun untuk kelengkapan nurse call dan stop kontak, sebanyak 48% RS yang belum memenuhi. Padahal, Budi menegaskan, ketersediaan bell dan colokan listrik di tiap tempat tidur adalah kebutuhan paling sederhana yang harusnya bisa disediakan tiap RS di ruang rawat inapnya.

"Nomor dua itu menurut saya enggak make sense, ini setiap tempat tidur harusnya ada bell dan colokan listrik, itu aja enggak ada. Ini kan enggak usah dibobok pakai kabel biasa harusnya bisa, enggak susah menurut kami," papar Budi.

Untuk outlet oksigen di setiap tempat tidur sebanyak 43% RS belum bisa memenuhi, dan ketersediaan kamar mandi dalam ruangan paling minim dari empat besar itu, dengan porsi 19% RS belum bisa memenuhi.

"Kita ingin kan kalau bisa buat kenyamanan jangan orang mesti keluar kamar mandinya kayak waktu kita misalnya di asrama TNI-Polrii bareng-bareng kamar mandinya," tutur Budi.

Mau VIP, Kombinasi Asuransi Swasta

Gunadi Sadikin menegaskan, sistem kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan tetap akan menghilangkan skema layanan ruang rawat inap berdasarkan kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan yang berlaku selama ini.

Skema KRIS ini akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda.

"Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royongnya banci, karena yang kaya bayar lebih dia harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong," tegas Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Asuransi sosial itu, harusnya yang kaya itu bayar lebih untuk tanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih minta lebih, nah konsep itu menurut saya harus diluruskan dengan KRIS," ungkapnya.

Dengan skema itu, Budi mengatakan, orang yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ketika ia ingin mendapatkan layanan yang lebih seperti ruang rawat inap VIP harus menggunakan skema campuran asuransi dengan swasta yang telah terintegrasi dengan layanan asuransi BPJS Kesehatan.

Budi mengatakan, mekanisme itu terlaksana dengan combine benefit antara asuransi kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan hanya khusus untuk orang-orang kaya. Skemanya ialah si orang kaya membayar asuransi hanya ke pihak asuransi swasta dan sisa porsinya dibayarkan pihak asuransi swasta ke BPJS Kesehatan.

"Kita sudah bikin mekanismenya dengan OJK dan BPJS adalah Budi Sadikin misalnya bayar BPJS, bayar Jasindo, atau karena Jasindo lebih besar, setiap orang yang ambil asuransi swasta dia harus ada porsi yang dibayarkan ke BPJS, jadi si orang ambil asuransi gak usah pusing dan BPJS gak pusing nagih," tuturnya.

"Jadi dari sisi user bayarnya satu, kalau dia sakit, datang ke rumah sakit dia kan gak mungkin ambil kelas bawah, dia pasti ambil tinggi," ucap Budi.

Budi mengatakan, skema asuransi ini penting diterapkan supaya porsi belanja kesehatan Indonesia yang saat ini masih minim ditanggung asuransi bisa porsinya mendominasi, yakni 80%. Dengan artinya ketika belanja kesehatan pada 2023 senilai Rp 614 triliun, maka Rp 491 triliunnya harus

12 PERSYARATAN MENGENAI FASILITAS RUANG PERAWATAN PADA PELAYANAN RAWAT INAP BERDASARKAN KRIS

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
2. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.
3. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
4. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 (dua) kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
5. Adanya nakas per tempat tidur.
6. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius.
7. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi).
8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
9. Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
12. Outlet oksigen.

sudah ditanggung asuransi, saat ini porsinya baru sekitar 32%.

"Jadi maksudnya swasta masuk bukan kita mau kapitalis atau mau apa, kita mau bagi semangat gotong royong ini coba dong yang mampu enggak bebani BPJS untuk habiskan jatah BPJS yang harusnya untuk orang-orang lebih bawah," tuturnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, konsep ini yang pada akhirnya membuat sistem KRIS tidak menghilangkan sistem layanan kelas di rumah sakitnya. Sebab, dengan iuran tunggal satu tarif di BPJS Kesehatan nantinya, akan tetap memberikan layanan kesehatan yang sama dalam konsep KRIS.

"Sebenarnya tidak berarti bahwa semua tempat tidur dalam satu rumah sakit itu KRIS, tidak, karena dalam aturannya itu untuk RS pemerintah cuma 60%, artinya 60% dari seluruh tempat tidur itu masih ada yang kelas 1 kelas 2 masih ada yang VIP dan ini lah yang dimungkinkan oleh pak menkes tadi kris itu betul-betul semua ditanggung BPJS," ucap Abdul Kadir.

Bila kelas mampu ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lebih, khususnya untuk ruang rawat inap, maka bisa memanfaatkan skema combine benefit dengan menambah asuransi swasta untuk layanan kesehatannya. (wid, ist, ant, rls/dya)

Kala Publik Ragukan Kelanjutan IKN, Tiba-tiba Petinggi Otorita Undur Diri

JAKARTA- Di tengah keraguan publik terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara buntut dari penghematan anggaran, kejutan baru hadir. Mohamed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengundurkan diri.

Pengunduran diri petinggi OIKN bukan kali ini saja terjadi. Pada masa Jokowi, pengunduran diri juga pernah diajukan oleh dua bos Otorita IKN; Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe. Mundur berjamaah dua bos IKN itu terjadi jelang Upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.

Mohamed Ali telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada tanggal 7 Februari 2025.

"Teman-teman direktur yang baik, hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat

turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN," ungkap dia dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Mohamed Ali memutuskan mundur dengan alasan ingin kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mohamed Ali sebelumnya adalah PNS tenaga pengajar dengan jabatan guru besar/profesor di Universitas Indonesia.

"Semua master plan, blue print, guidelines, dan sebagainya yang telah kita siapkan dan sosialisasikan ke publik dalam membangun IKN dengan mengedepankan 5 principles utama: IKN sebagai green, resilient, sustainable, inclusive dan smart city dapat terus kita implementasikan," pesannya.

"Semua program kerja yang telah dan akan terus kita laksanakan selalu merujuk kepada perencanaan dan principles di atas agar pembangunan IKN dapat mendeliver tidak hanya pembangunan fisik (hardware), juga dengan pengembangan teknologi (software) dan peningkatan kapasitas SDM (brainware). Bangun dan berdayakan masyarakat terus

menerus, hakikat pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat," tuturnya.

Mohamed Ali percaya proyek IKN adalah masa depan Indonesia. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberinya kesempatan untuk berkarya di IKN.

"Kita akan terus membangun ekosistem, membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, IKN bukan hanya sekedar membangun proyek. Oleh karenanya komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan," sebutnya.

"Terima kasih atas kekompakan dan kerja samanya dalam bekerja bersama selama ini. InsyaAllah persahabatan dan persaudaraan yang telah dibina saat ini akan terus



Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi (baju putih) saat menjajal Trem Otonom Terpadu yang tengah diuji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (dok)

menjadi penyambung tali silaturahmi kita ke depan. Proud to have you all," tutupnya.

Namun menurut Staf Khusus Kepala Otorita IKN Troy Pantouw, Mohamed Ali Berawi sampai saat ini masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di OIKN.

"Pak Ali Berawi pada saat ini masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di OIKN," katanya, Selasa (11/2/2025). (wid, rls, ist/dya)

Menyoal Stafsus Kemenhan Termasuk Deddy Corbuzier Netizen: Anggaran ke Bawah Dipangkas, ke Atas Digas



Deddy Corbuzier dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan, Selasa (11/2/2025) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin.

JAKARTA - Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemhan) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin pada Selasa (11/2/2025) heboh dibicarakan di media sosial, khususnya X.

melantik Staf Khusus Kemhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta," ujar Sjafrie dikutip Selasa (11/2/2025).

Usai pelantikannya, banyak netizen yang ramai-ramai

memberikan kritikan atas keputusan tersebut.

Tidak hanya soal Deddy yang sempat viral karena membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan terkesan memojokkan para siswa.

Kini netizen semakin miris melihat adanya pelantikan ini tepat setelah pengumuman soal efisiensi anggaran ke menteri/lembaga (K/L) mencapai lebih dari 50%.

"Efisiensi Anggaran. Anggaran ke bawah dipangkas anggaran ke atas digasss. Deddy Corbuzier dilantik jadi stafsus Menhan," kata netizen X.

"Bicara efisiensi, lalu Deddy Corbuzier jadi stafsus Menhan :)))," kata lainnya. (Elva/Fajar).

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan RI untuk membahas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deddy Corbuzier setelah yang bersangkutan resmi dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

menjelaskan Staf Khusus Menteri termasuk ke dalam wajib lapor (WL) berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024.

Perkom tersebut efektif berlaku 6 bulan pascaditetapkan, atau 1 April 2025. "KPK akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Pertahanan, apakah Staf Khusus Menteri setara dengan Pejabat eselon I, II, atau III. Mengingat dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2019, atas jabatan tersebut termasuk sebagai WL," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

"Sehingga jika setara dengan jabatan tersebut, yang bersangkutan wajib melaporkan LHKPN-nya dengan batas waktu 3 bulan sejak pelantikan, atau 12 Mei 2025," lanjut dia.

Namun, jika tidak termasuk dalam jabatan tersebut, batas waktu pelaporannya dihitung dua bulan sejak Perkom 3 Tahun 2025 efektif berlaku, yaitu 1 Juni 2025.

"KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini," ucap Budi. (wid, x, ist, ant/dya)

Rp 44 Miliar Dana Transfer Kena Pemangkasan di Kabupaten Malang

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya regulasi baru yang berdampak pada pemangkasan dana transfer sebesar Rp 44 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan ada 3 regulasi utama yang berdampak pada struktur keuangan daerah. Aturan itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Surat Edaran (SE) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025.

"Dari 3 ketentuan tersebut pasti kita sangat terdampak, dari sisi struktur keuangan APBD pastinya," ujar Tomie, Selasa (11/2/2025).

Tomie mengungkapkan, salah satu pos anggaran yang mengalami efisiensi yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Tomie menjelaskan, DAU yang diterima daerah terdiri dari dua kategori, yaitu DAU bebas yang dapat digunakan sesuai kebijakan daerah,

serta DAU yang telah ditentukan penggunaannya.

Menurutnya, Kabupaten Malang terkena pemangkasan pada DAU yang telah diperuntukkan untuk proyek pembangunan infrastruktur di sektor pekerjaan umum (PU), dengan total efisiensi sebesar Rp 33,9 miliar atau hampir Rp 34 miliar.

"Berbicara mengenai pekerjaan umum, pasti yang terpengaruh adalah Bina Marga, PU Sumber Daya Air (SDA), dan Cipta Karya," jelasnya.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor irigasi juga terkena pemangkasan sebesar Rp 9,5 miliar. Secara total, Tomie mengatakan Kabupaten Malang harus menyesuaikan anggarannya akibat pengurangan dana transfer dari pusat yang mencapai hampir Rp 44 miliar. Jumlah ini setara dengan 1,3 persen dari total dana transfer yang diterima daerah.

Lebih lanjut, Tomie menuturkan dampak efisiensi ini juga menyentuh aspek belanja operasional pemerintahan, termasuk perjalanan dinas yang akan dipangkas hingga 50 persen, serta belanja pendukung lain seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dan

kegiatan seremonial.

"Kami masih dalam proses perhitungan, misalnya perjalanan dinas yang dikurangi 50 persen itu berapa miliar. Untuk efisiensi anggaran kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD) juga masih dihitung lebih lanjut," tambahnya.

Namun, Tomie memastikan DAK nonfisik serta dana insentif fiskal tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

Sementara itu, Tomie mengungkapkan hingga saat ini belum ada kejelasan apakah dana efisiensi ini akan dialokasikan untuk program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pusat, sambungnya, belum menerbitkan petunjuk teknis terkait apakah dana MBG akan langsung ditangani oleh pusat atau tetap dialokasikan ke daerah.



Ilustrasi proyek pekerjaan oleh PU Bina Marga Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kab Malang)

"Tapi yang jelas, dari efisiensi anggaran yang hampir Rp 44 miliar itu, secara prinsip sudah dinolkan oleh pusat. Artinya, kalau nanti kita melihat kebutuhan infrastruktur masih mendesak, bisa jadi efisiensi kita akan dialihkan ke sana. Tentu dengan catatan, jika pusat memberikan kewenangan untuk menggeser alokasi anggaran," pungkasnya. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Mulai Garap Proyek Sudetan Candi Panggung, Target Rampung Juni 2025



Titik lokasi proyek sudetan di Jalan Candi Panggung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Selasa (11/2/2025). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) mulai mengerjakan proyek sudetan di Jalan Candi Panggung, Lowokwaru. Proyek sepanjang 700 meter ini menelan anggaran sekitar Rp 1 miliar dan ditargetkan rampung

pada Juni 2025.

Kepala DPUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menegaskan pekerjaan proyek ini akan diawasi secara ketat agar hasilnya optimal dan tidak asal-asalan. Menurutnya, pembangunan drainase harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

"Anggarannya sekitar Rp 1 miliar sekian, dikerjakan oleh CV lokal. Kami pastikan pengawasan dilakukan ketat karena dampaknya cukup luas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial," ujar Dandung, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Selasa (11/2/2025).

Dandung menjelaskan, proyek ini bertujuan untuk mengantisipasi luberan banjir dari kawasan Sengkaling, Kecamatan Dau

Kabupaten Malang, yang kerap menggenangi wilayah Tunggulwulung, Akordion, dan Tulusrejo.

Nantinya, sudetan tersebut akan mengalirkan air hujan ke Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) dan terintegrasi dengan proyek drainase yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Lelang pekerjaannya (proyek sudetan) kan sudah selesai, Detail Engineering Design (DED) juga sudah rampung sejak tahun lalu. Jadi di Februari ini bisa masuk tahap konstruksi," tambahnya.

Dandung menjelaskan proyek sudetan di Jalan Candi Panggung, ini bertujuan untuk mendukung pembangunan sistem drainase di Jalan Soekarno-Hatta. Proyek yang dikerjakan dengan anggaran Rp 32 miliar dari Pemprov Jatim tersebut, menurutnya memiliki panjang sekitar 1.300 meter dan akan dimulai setelah Idul Fitri 2025.

Dandung menuturkan proyek drainase di Suhat berbeda dengan

proyek sudetan Candi Panggung. Seluruh proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek Suhat berada di bawah kendali Pemprov Jatim, sementara Pemkot Malang hanya sebagai penerima manfaat dan bertugas mengintegrasikan sistem drainase dengan proyek sudetan yang sedang dibangun.

"Setelah Idul Fitri mulai dikerjakan, targetnya selesai dalam enam bulan, jadi diperkirakan rampung Oktober 2025," jelasnya.

Lebih lanjut, Dandung menuturkan proyek sudetan dan drainase ini telah mengacu pada masterplan drainase Kota Malang. Dandung berharap, setelah proyek-proyek ini rampung, masalah banjir yang selama ini terjadi di beberapa titik dapat teratasi dengan lebih efektif.

"Semoga setelah proyek ini selesai, banjir di Kota Malang bisa berkurang secara signifikan. Semua penanganannya sudah mengacu pada masterplan drainase yang ada," pungkasnya. (Santi/Dya)

Denmark Gertak Trump, Tawar California Rp 16.000 Triliun



Warga AS di Huntington Beach, California melakukan unjuk rasa pada "May Day" menuntut dibukanya kembali aktivitas ekonomi (AP)

KOPENHAGEN - Denmark menggertak balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menawarkan keinginan membeli negara bagian California sebesar US\$1 triliun atau setara Rp16.380 triliun.

Kampanye itu mencuat setelah Trump sesumbar bakal membeli Greenland, bahkan tak menutup kemungkinan menggunakan cara apapun untuk menguasai wilayah yang masih di bawah kekuasaan Denmark itu.

Di bawah rencana yang diberi nama "Denmarkification" ini, seperti dilansir The Sun, Selasa (11/2/2025), Disneyland yang ada di negara bagian California akan diberi nama baru.

Denmark dan AS di bawah Trump belakangan berseteru soal Greenland, pulau terbesar di dunia yang sejak lama ingin dibeli Trump.

Dilansir dari Anadolu Agency, situs kampanye ini menuliskan bahwa California memiliki 300 hari terpaan sinar matahari dalam setahun, dengan investasi teknologi penting dan

"avocado toast selamanya". Idiom itu merujuk pada hal yang amat diidam-idamkan.

Situs itu juga menyebut jika nanti California dibeli, mereka akan mengganti nama Disneyland dengan "Hans Christian Andersenland", nama seorang penulis dongeng yang terkenal dari Denmark.

Kampanye "Denmarkifikasi" ini juga menyatakan Trump "bukan penggemar" California dan bersedia melepas negara bagian itu "dengan harga yang tepat."

Seiring dengan itu, kampanye ini berjanji akan membawa supremasi hukum, perawatan kesehatan yang menjangkau seluruh elemen, serta politik berbasis fakta ke California.

Denmark dan AS belakangan berseteru gara-gara Greenland.

Sejak belum dilantik, Trump sudah gembar-gembor ingin membeli Greenland, dan keinginan itu terus dia lontarkan setelah resmi menjabat presiden.

Trump beralasan membeli Greenland adalah kebutuhan mutlak demi keamanan Amerika Serikat.

Greenland adalah wilayah di bawah kedaulatan Denmark sejak 1953. Trump diduga tertarik dengan kawasan ini karena lokasinya yang strategis dan kandungan sumber daya mineralnya yang kaya.

Diketahui seorang warga Denmark bernama Xavier Dutoit yang ada di balik rencana untuk membeli California dari AS ini. Dia juga melontarkan tekad untuk menyebarkan nilai-nilai Denmark di California nantinya.

Gerakan yang dicetuskan Dutoit ini sudah mendapatkan hampir 200.000 pendukung pada situs lengkap yang dibuatnya untuk menjelaskan gagasannya tersebut.

Menurut situs tersebut, Dutoit meyakini bahwa Denmark seharusnya memiliki California karena "Mengapa tidak?".

"Pernahkah Anda melihat peta dan berpikir, Anda tahu apa yang dibutuhkan Denmark? Lebih banyak sinar matahari, pohon palem, dan sepatu roda. Iya, kita memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mewujudkan mimpi itu," sebut situs tersebut.

Dutoit menjelaskan bahwa membeli California dari AS akan memberikan masyarakat Denmark akses terhadap sinar matahari tanpa akhir dan "dominasi teknologi" berkat Silicon Valley yang ada di California.

Dia juga meyakini California akan menjadi peluang besar untuk berbagi budaya Denmark dengan AS, karena

dia ingin mengganti nama Disneyland menjadi Hans Christian Andersenland. "Mickey Mouse dengan helm Viking? Iya, silakan," tulis situs itu.

Gagasan satire ini menjadi respons pahit terhadap rencana Trump untuk membeli Greenland, yang saat ini dimiliki Denmark.

Trump telah berulang kali melontarkan gagasan untuk mengakuisisi Greenland wilayah otonom Denmark dengan alasan nilai strategis dan ekonomi yang signifikan dari pulau tersebut bagi AS. Trump bertekad memperluas jejak AS hingga ke Greenland dan melanjutkan upaya keamanan internasional.

Dia telah mengincar Greenland sejak tahun 2019 karena lokasinya yang strategis di Arktik, yang menawarkan rute terpendek dari Amerika Utara ke Eropa. Ditambah lagi, Trump khawatir Greenland akan jatuh ke tangan Rusia dan China jika AS tidak mengambil alih kendali.

Gagasan Trump menuai penolakan keras dari para pejabat Denmark dan Greenland sendiri. Namun Trump menyatakan siap menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk mendapatkan wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio bahkan menekankan bulan lalu bahwa pembelian Greenland menjadi tujuan yang serius, dan "bukan lelucon".

Namun tidak demikian dengan gagasan Dutoit, yang dijelaskan pada bagian bawah situs soal rencana membeli California itu bahwa gerakan tersebut hanyalah lelucon. (Anadolu, The sun, ist/nei)

Dua Pesawat Tabrakan Lagi di Bandara AS, 1 Orang Tewas dan 3 Luka

ARIZONA - Tabrakan pesawat terjadi lagi di Amerika Serikat (AS). Setidaknya satu orang tewas ketika sebuah pesawat jet pribadi menabrak pesawat lain setelah mendarat di sebuah bandara Amerika Serikat.

Satu orang masih terjebak di dalam salah satu pesawat di Bandara Scottsdale di Arizona, sementara tiga orang lainnya dibawa ke rumah sakit.

Dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/2/2025), gambar-gambar dari tempat kejadian menunjukkan sebuah jet tampaknya telah menabrak bagian belakang pesawat yang lebih besar.

"Sebuah Learjet 35A keluar dari landasan pacu setelah mendarat dan menabrak jet bisnis Gulfstream 200 di landasan di Bandara Kota Scottsdale di Arizona," kata juru bicara Otoritas

Penerbangan Federal (FAA).

"Kami tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam pesawat. FAA untuk sementara menghentikan penerbangan ke bandara tersebut," imbuhnya.

Dave Folio, dari Departemen Pemadam Kebakaran Scottsdale, mengatakan unit-unit pemadam berada di landasan pacu untuk mencoba mengeluarkan satu orang dari dalam salah satu pesawat.

"Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami memiliki lima orang, satu orang meninggal saat tiba di rumah sakit, dua orang dalam kondisi kritis yang telah dibawa ke pusat trauma setempat," katanya dalam konferensi pers.

Satu orang lainnya yang

kondisinya digambarkan stabil, juga dibawa ke rumah sakit.

Kecelakaan itu merupakan yang terbaru dari serangkaian tragedi penerbangan yang mengguncang Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Januari, sebuah jet penumpang bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat AS di Washington, menewaskan semua 67 orang di dalam kedua pesawat.

Bencana itu segera diikuti oleh jatuhnya sebuah pesawat medis ke kawasan ramai di Philadelphia, menewaskan tujuh orang dan melukai



Petugas pemadam kebakaran bekerja di sekitar lokasi jatuhnya Learjet di Bandara Scottsdale setelah bertabrakan dengan pesawat yang diparkir pada hari Senin, 10 Februari 2025, di Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat, Senin (10/2/2025). (Istimewa)

19 orang. Minggu lalu sebuah pesawat kecil dengan 10 orang di dalamnya, jatuh saat terbang di antara dua pemukiman terpencil di Alaska. Tidak ada yang selamat. (AFP, ist/nei)



MANFAAT KACANG MERAH

Kurangi Risiko Kanker hingga Kesehatan Jantung

KACANG merah merupakan salah satu makanan yang sering dikonsumsi, namun manfaat kesehatannya belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Meski ukurannya kecil, kacang merah mengandung beragam nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Kacang ini dikenal kaya protein dan sering dijadikan sebagai sumber protein rendah lemak bagi vegetarian.

Kacang merah sering dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan perut, kembung, dan gas. Mengonsumsi kacang berbentuk seperti kacang merah ini juga dapat membuat perut sakit.

Namun, jangan hindari kacang merah, karena masalah ini biasanya muncul karena kacang merah tidak dimasak dengan baik atau dikonsumsi secara berlebihan.

Faktanya, kacang merah justru penting menjadi bagian dari diet Anda, karena mengandung banyak nutrisi seperti protein, serat, dan kalium. Kacang merah bermanfaat bagi jantung dan usus Anda.

Penderita diabetes juga dapat mengonsumsi kacang merah yang umumnya berwarna merah tua ini.

Mengutip Healthshots, berikut ini manfaat sehat kacang merah:

Dapat mengurangi risiko kanker

"Kacang-kacangan ini mengandung antioksidan dan senyawa tanaman seperti polifenol, flavonoid, dan lignan yang dapat membantu melawan kanker," kata sang ahli. Dalam sebuah penelitian 2009, yang diterbitkan dalam Cancer Causes & Control, ditemukan hubungan antara asupan kacang-kacangan yang lebih tinggi, termasuk kacang merah, dan penurunan risiko beberapa kanker. Daftar tersebut mencakup kanker perut, kolorektal, dan ginjal.

Meningkatkan kesehatan jantung
"Kacang merah mengandung kalium dan magnesium, yang mendukung kesehatan kardiovaskular," kata Chaudhry. Tekanan darah tinggi diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan serangan jantung. Kacang ini dapat menurunkan tekanan darah, berkat kandungan kaliumnya yang tinggi.

Meningkatkan kesehatan jantung

Kaya akan protein nabati
Kacang-kacangan yang padat nutrisi ini merupakan sumber protein nabati yang baik, sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi para vegetarian.

Membantu menurunkan berat badan

Mendukung kesehatan pencernaan
Karena kaya akan serat makanan, kacang-kacangan ini dapat melancarkan pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. "Kacang-kacangan ini memberi makan bakteri baik di usus, sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan mikrobioma usus. Serat pada makanan super ini juga dapat menambah jumlah tinja, dan mencegah sembelit," kata sang ahli.

Dapat mendukung fungsi otak
Salah satu manfaat kacang merah berkaitan dengan otak Anda. Vitamin B, folat, dan magnesium dalam kacang ini dapat berkontribusi pada peningkatan fungsi otak dan stabilitas suasana hati.

Memperkuat tulang dan sendi
Makanan super ini mengandung nutrisi penguat tulang seperti kalsium dan magnesium, sehingga tulang yang lebih kuat menjadi salah satu manfaat kacang merah.

Memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil
Manfaat kacang merah juga baik untuk ibu hamil. Jenis kacang ini mengandung nutrisi penting bagi kesehatan ibu dan janin, seperti protein, asam folat, dan zat besi. Ibu hamil membutuhkan lebih banyak asupan zat besi dan asam folat untuk mendukung pertumbuhan janin. Kekurangan zat besi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga depresi pascamelahirkan. (nei,ist/dya)

Membantu mengendalikan gula darah

Makanan super ini memiliki indeks glikemik (IG) rendah, yang berarti dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah secara perlahan dan stabil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Frontiers In Nutrition pada 2022, kacang merah dikategorikan sebagai makanan IG rendah, sehingga cocok untuk penderita diabetes tipe 2.

Mendukung kesehatan pencernaan
Karena kaya akan serat makanan, kacang-kacangan ini dapat melancarkan pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. "Kacang-kacangan ini memberi makan bakteri baik di usus, sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan mikrobioma usus. Serat pada makanan super ini juga dapat menambah jumlah tinja, dan mencegah sembelit," kata sang ahli.

Membantu menurunkan berat badan

Kacang merah rendah lemak dan tinggi serat makanan dan protein, sehingga cocok bagi orang yang ingin mengelola berat badan. "Serat dapat memperlambat pencernaan dan membuat Anda kenyang untuk sementara waktu. Protein, di sisi lain, dapat meningkatkan metabolisme dan mengurangi rasa lapar," kata ahli.

Membantu menurunkan berat badan

Kacang merah rendah lemak dan tinggi serat makanan dan protein, sehingga cocok bagi orang yang ingin mengelola berat badan. "Serat dapat memperlambat pencernaan dan membuat Anda kenyang untuk sementara waktu. Protein, di sisi lain, dapat meningkatkan metabolisme dan mengurangi rasa lapar," kata ahli.

Dapat mendukung fungsi otak

Salah satu manfaat kacang merah berkaitan dengan otak Anda. Vitamin B, folat, dan magnesium dalam kacang ini dapat berkontribusi pada peningkatan fungsi otak dan stabilitas suasana hati.

"Folat dan zat besi dapat membantu memproduksi sel darah merah, dan memastikan pasokan oksigen yang lebih baik ke otak Anda," kata sang ahli.

Memperkuat tulang dan sendi

Makanan super ini mengandung nutrisi penguat tulang seperti kalsium dan magnesium, sehingga tulang yang lebih kuat menjadi salah satu manfaat kacang merah.

"Kalsium adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Magnesium, di sisi lain, dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang," kata sang ahli.

Memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil

Manfaat kacang merah juga baik untuk ibu hamil. Jenis kacang ini mengandung nutrisi penting bagi kesehatan ibu dan janin, seperti protein, asam folat, dan zat besi.

Ibu hamil membutuhkan lebih banyak asupan zat besi dan asam folat untuk mendukung pertumbuhan janin. Kekurangan zat besi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga depresi pascamelahirkan. (nei,ist/dya)

Arkeolog Temukan Harta Karun Pigmen Biru di Roma



Mediterrania kuno. Salah satu pusat produksi berada di kota Alexandria di Mesir. Pigmen juga diproduksi secara lokal di semenanjung Italia. Jejak pigmen telah ditemukan di antara reruntuhan Pompeii, kota Romawi yang hancur oleh letusan gunung berapi pada 79 Masehi.

Para peneliti di Archaeological Park of the Colosseum berharap penggalian yang sedang berlangsung di Domus Aurea bisa mengungkap lebih banyak bukti pigmen biru dan menemukan bagaimana pengrajin kuno menggunakan pigmen ini.

“Daya tarik yang tersampaikan oleh kedalaman warna biru pigmen ini sungguh luar biasa. Sekali lagi, Domus Aurea memukau dan memperlihatkan kecemerlangan warna yang digunakan oleh para pelukis yang dengan terampil menghiasi ruangan-ruangan istana kekaisaran yang berharga dan berkelas ini,” ujar Alfonsina Russo, Direktur Archaeological Park of the Colosseum, mengutip IFL Science.

Penemuan bongkahan biru Mesir ini memperkaya pemahaman tentang tingkat kecanggihan seni Romawi dan pengaruhnya pada periode Renaisans. Salah satu karya terkenal yang terinspirasi dari Domus Aurea adalah The Triumph of Galatea oleh Raphael.

Biru Mesir yang ditemukan tidak hanya menjadi bukti kemajuan teknologi Romawi, tetapi juga simbol estetika dan warisan budaya yang terus memikat dunia seni. (nei,ist/dya)

ARKEOLOG menemukan bongkahan pigmen biru yang mencolok, seukuran jeruk bali, dengan berat 2,4 kilogram, di halaman istana Kaisar Nero di Roma, tempat berlangsungnya pesta-pesta legendaris.

Bongkahan pigmen biru ini ditemukan selama penggalian Domus Aurea yang dilakukan baru-baru ini. Domus Aurea adalah kediaman pada era Kaisar Nero yang terletak di dekat Colosseum di jantung kota Roma Kuno. Istana ini dibangun setelah kebakaran besar tahun 64 M, sebuah bencana yang diduga dilakukan oleh Nero untuk membersihkan tempat bagi

istana barunya yang megah.

Dalam penggalian baru-baru ini, para arkeolog menemukan dua baskom berisi pigmen warna yang digunakan dalam dekorasi dinding, termasuk taburan oker merah dan kuning. Namun, yang paling menarik adalah penemuan bongkahan besar pigmen biru seberat 2,4 kilogram.

Domus Aurea adalah tempat yang sangat mewah. Istana ini memiliki belasan ruangan yang indah, termasuk kamar mandi dengan dua pilihan air: air biasa dan air belerang. Di sana juga terdapat beberapa ruang perjamuan, salah satu yang paling terkenal adalah

coenatio rotunda yang konon memiliki langit-langit berputar untuk meniru gerakan langit.

Pigmen biru yang ditemukan merupakan bahan utama dalam kemegahan istana Domus Aurea. Pigmen ini sangat dicari oleh para penguasa seantero dunia pada era tersebut. Pigmen digunakan dalam karya seni untuk menciptakan warna yang lebih nyata.

Penggunaan pigmen paling awal didokumentasikan berasal dari pertengahan milenium ketiga di Mesir dan Mesopotamia, kemudian menyebar ke sebagian besar wilayah



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Makanan Wajib saat Perayaan Cap Go Meh



FESTIVAL Cap Go Meh tahun ini akan berlangsung pada tanggal 12 Januari 2025, yang menandai akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Mengapa Cap Go Meh begitu istimewa? Perayaan ini menandai berakhirnya rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek selama 15 hari.

Keluarga berkumpul, menikmati hidangan spesial, menyaksikan pertunjukan barongsai yang energik, dan menerangi malam dengan lampion-lampion cantik. Lampion, dengan cahayanya yang gemerlap, melambangkan harapan akan keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun.

Namun, lebih dari sekadar perayaan keluarga, Cap Go Meh juga kaya akan tradisi unik yang bervariasi antar daerah di Indonesia. Salah satu yang paling dikenal adalah pawai lampion yang meriah, menghiasi jalanan dengan warna-warni cahaya yang menawan.

Selain itu, tarian barongsai dan naga juga menjadi atraksi wajib, dipercaya mampu mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan bagi masyarakat.

Masyarakat Tionghoa biasanya merayakan Cap Go Meh dengan kumpul bersama keluarga, dan menikmati makanan khas festival budaya ini. Hidangan yang disajikan bukan sekadar makanan lezat, tapi juga mengandung simbol atau makna tertentu.

Ada makanan yang menyimbolkan keberuntungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Penasaran makanan wajib saat perayaan Cap Go Meh apa saja? Yuk, simak daftarnya dalam artikel ini.

Makanan Wajib Saat Perayaan Cap Go Meh

Berikut ini beberapa makanan yang sudah pasti tersaji saat perayaan

Cap Go Meh, karena melambangkan hal-hal positif.

1. Lontong Cap Go Meh

Merujuk buku *Kuliner Khas Tionghoa Di Indonesia: Rahasia Resep dan Kisah* di Baliknya susunan Nick Molodysky, lontong Cap Go Meh merupakan sajian hasil asimilasi kuliner Tionghoa dan Jawa.

Pada zaman dahulu, penduduk Tionghoa di Pulau Jawa memilih lontong sebagai pengganti ronde. Makanan dari beras ini dipercaya sebagai simbol nasib baik, apabila dikonsumsi di awal tahun.

Teksturnya yang padat dimaknai sebagai kemakmuran, sedangkan bentuknya yang panjang dianggap simbol panjang umur. Kondimennya seperti telur dan kuah santan kuning dipercaya melambangkan emas dan kemakmuran.

2. Kue Keranjang

Kue keranjang adalah makanan yang menyimbolkan keberuntungan dan sering dikonsumsi pada malam Tahun Baru Imlek. Meski begitu, kue mirip dodol ini juga kerap disajikan dalam perayaan Cap Go Meh.

Dikutip dari *China Highlights*, dalam bahasa Mandarin, kue keranjang (niángāo/nyen-gaoww) terdengar seperti frasa yang artinya "semakin tinggi dari tahun ke tahun". Dalam pikiran masyarakat Tionghoa, frasa tersebut berarti jabatan yang semakin tinggi, bisnis semakin makmur, dan hidup semakin baik.

3. Jeruk Mandarin

Jeruk mandarin sering dikonsumsi saat Cap Go Meh, karena bentuknya yang bulat dan berwarna keemasan. Selain itu, dari segi pelafalan, jeruk mandarin (chéng /chnng) terdengar mirip dengan frasa "kesuksesan".

Salah satu cara penulisan jeruk mandarin (jú /jyoo) juga mengandung aksara mandarin yang artinya keberuntungan (jí /jee). Itulah mengapa mengonsumsi, serta memajang jeruk mandarin di rumah dianggap dapat mendatangkan kemakmuran.

4. Ikan

Dalam bahasa Mandarin, ikan (yu) memiliki pelafalan yang sama dengan kata "berkelimpahan". Orang-orang Tionghoa mengonsumsi ikan dengan harapan akan diberi kelimpahan dalam usaha dan keuangan.

Menu ikan yang sangat umum disajikan saat Cap Go Meh adalah ikan gurame asam manis atau ikan tim jahe. Saat dihidangkan, posisi kepala ikan harus dihadapkan ke arah tamu atau orang tua sebagai bentuk penghormatan.

5. Sayuran

Menu makan malam perayaan Cap Go Meh tentunya tidak lengkap tanpa sayuran. Jenis sayuran yang biasanya menghiasi meja makan adalah selada dan pakcoy muda.

Dalam bahasa Mandarin, selada terdengar mirip dengan kata 'menjadi kaya'. Sedangkan pakcoy melambangkan kekayaan dan keberuntungan untuk tahun ini, serta nasib baik untuk masa depan.

6. Telur The

Telur yang direbus dengan teh dan rempah-rempah ini, dipercaya membawa keberuntungan dan kesehatan.

Rasanya yang khas dan aroma yang harum menjadikannya favorit dalam perayaan Cap Go Meh.

7. Bubur Tiga Warna

Bubur ini terdiri dari tiga warna

yang melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan. Biasanya dibuat dari bahan seperti ketan, kacang merah, dan gula aren.

Dengan menyajikan makanan-makanan ini, perayaan Cap Go Meh menjadi lebih meriah dan penuh makna.

Makna Spiritual Cap Go Meh

Di balik kemegahannya, Cap Go Meh memiliki makna spiritual yang mendalam, khususnya bagi umat Konghucu. Malam ke-15 ini diyakini sebagai waktu yang tepat untuk memohon berkah dan keselamatan kepada dewa-dewa, serta keberuntungan dan rezeki di tahun baru.

Doa dan persembahan diberikan sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Perpaduan antara tradisi, budaya, dan spiritualitas inilah yang membuat Cap Go Meh menjadi perayaan yang unik dan bermakna. Perayaan ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Semoga perayaan Cap Go Meh selalu membawa kedamaian, keberuntungan, dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat. (nei,ist/dya)



Mendadak Bahlil ... (dari Hal 1)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menonaktifkan Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Jendral Migas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menunjuk Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno untuk menduduki posisi Pelaksana Harian (Ph) Dirjen Migas

"(Plt?) PLH Dirjen Migas adalah Dirjen Minerba Pak Triwinarno," kata Bahlil usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). "Itu bagian dari konsolidasi institusi, hal yang wajar," lanjutnya.

Namun, Bahlil Lahadalia membantah penonaktifan Achmad Muchtasyar dari jabatan dirjen migas terkait peristiwa tersebut. Ia menjelaskan penggeledahan terkait dengan impor minyak mentah (crude oil) pada 2018-2019.

"Saya dapat informasi penggeledahan itu terkait impor crude pada 2018-2019, sedangkan pergantian ini adalah urusan internal," tegasnya.

Plt Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengungkapkan hal senada.

Meski tidak menjelaskan secara pasti penonaktifan Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas, tapi ini dilakukan di tengah polemik penggeledahan Kantor Ditjen Migas pada Senin (10/2/2025) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dan kisruh LPG 3 kg sejak awal bulan ini.

Chrisnawan mengatakan bahwa penyesuaian jabatan di suatu organisasi adalah hal yang lumrah. Karena itu, guna menjawab tantangan ke depan, Kementerian ESDM telah melakukan penyesuaian atas beberapa pejabat tinggi yang ada.

"Sebagai bagian dari akselerasi organisasi yang tangguh, berkesinambungan dan mampu menjawab tantangan ke depan, Kementerian ESDM telah melakukan penyesuaian atas beberapa pejabat tinggi yang ada. Adapun penunjukan pejabat baru akan dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku," kata Chrisnawan, Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan informasi yang beredar, Achmad Muchtasyar dinonaktifkan dari jabatannya sejak Senin malam (10/02/2025).

Perlu diketahui, Achmad Muchtasyar baru dilantik sebagai Dirjen Migas oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (16/1/2025).

Sebagai gambaran, Achmad Muchtasyar sempat menjadi Direktur di PT PGN sejak Mei 2021-November 2023. Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Rekayasa Industri pada

September 2020-Mei 2021.

Pada tahun 2019, Achmad juga pernah menjabat sebagai Spesialis Layanan Transportasi Laut, Kemaritiman, dan Tol Laut hingga tahun 2020.

Dia juga sempat menjadi CBDO Bakrie Metal Industry pada tahun 2015 hingga tahun 2016 lalu. Achmad juga sempat menjalani tugas di SKK Migas tahun 2013 hingga 2015.

Kementerian ESDM memang tengah jadi sorotan. Mulai dari kebijakan melarang warung-warung menjual LPG 3 kg yang menuai banyak protes dari warga hingga penggeledahan kantor Kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM oleh Kejaksaan Agung kemarin.

Soal penggeledahan itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkannya saat ini hal tersebut juga sedang ada dalam tahap evaluasi internal.

"Tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi, itu untuk kita lebih independen untuk melihat proses hukum," lanjutnya.

Ia menegaskan Kementerian ESDM juga akan mengikuti proses hukum yang berlaku serta bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, Yuliot mengungkap kinerja Kementerian ESDM tidak terganggu atas penggeledahan tersebut.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Senin (10/2/2025). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah.

Selain itu, juga terkait produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Penggeledahan sendiri berlangsung sejak siang hingga sore yang dilakukan di tiga ruangan berbeda.

"Dilakukan di tiga tempat atau di tiga ruangan. Di antaranya ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti. Diantaranya lima kardus berisi dokumen, barang bukti elektronik berupa ponsel sebanyak 15 unit, satu unit laptop, serta empat soft file.

"Setelah barang-barang tersebut ditemukan, dikumpulkan, maka oleh penyidik juga pada saat yang sama dilakukan penyitaan," ucapnya. Nantinya, kata dia, barang bukti yang disita akan didalami untuk membuat terang dugaan korupsi ini.

Giliran Solar Subsidi Ditertibkan

Terkait kelanjutan penertiban LPG 3 Kg, Kementerian ESDM tengah merumuskan pembentukan badan pengawas untuk mengawasi distribusi dan penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

"Kalau saya akan katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi. Lembaga itu bisa BPH Migas atau lembaga lain, seperti lembaga ad-hoc. Saya lagi merumuskan dengan tim mana yang lebih cocok agar tidak terjadi pemborosan anggaran," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Bahlil menegaskan pengawasan ketat diperlukan untuk menjamin harga dan volume LPG subsidi tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasalnya, subsidi ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Di sisi lain, pemerintah berencana menertibkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi agar tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Pengamat energi mengingatkan selama ada opsi harga yang lebih murah di pasaran, maka potensi penyalahgunaan solar akan selalu ada.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengutarakan gagasan ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

"Kami akan menerbitkan pengaturan untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran," tutur Erika Retnowati, Kepala BPH Migas.

Dalam paparannya, Erika mengatakan saat ini aturan volume solar adalah 60 liter per hari untuk kendaraan roda empat, 80 liter untuk kendaraan roda enam, dan 200 liter untuk kendaraan dengan roda di atas enam.

Berdasarkan kajian BPH Migas dan tim dari Universitas Gadjah Mada, Erika mengatakan jumlah itu "terlalu banyak karena melebihi kapasitas tangkinya, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan."

BPH Migas, sambung Erika, juga akan meningkatkan pengawasan di titik-titik penyerahan solar bersubsidi seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBB).

SPBB merupakan fasilitas Pertamina untuk kapal-kapal nelayan, adapun TBBB umumnya berlokasi dekat pelabuhan atau kilang minyak.

Saat ini, harga BBM solar bersubsidi di pasaran adalah Rp 6.800 per liter meski harga aslinya di atas Rp 11.000 per liter.

Adanya dua harga berbeda ini membuat praktik-praktik penyelewengan bahan bakar diesel ini

tidak terhindarkan, menurut pengamat energi.

Selain itu, belum ada kriteria yang jelas dan terperinci mengenai siapa saja yang berhak menerima solar bersubsidi dalam aturan tata niaga BBM di Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 menyebutkan penerima solar bersubsidi adalah pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK), petani, nelayan, transportasi umum, pelayanan umum, dan pengguna kendaraan pribadi.

Akan tetapi, pengamat mengatakan pengendaliannya sangat sulit diterapkan di lapangan. "Pada dasarnya penerima solar subsidi adalah untuk usaha mikro atau kecil, petani, nelayan, pribadi dan berbagai pelayanan umum," ujar Putra Adhiguna, analis energi dan managing director Energy Shift Institute.

"Namun kejelasan [mengenai] penerima dan pengendaliannya sangat sulit diterapkan di lapangan. Batasan pengguna untuk angkutan barang perkebunan dan tambang pun tidak mudah." (wid, din, ist, rls/dya)

Siapa Achmad Muchtasyar?

- Lulusan Sarjana Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Memiliki gelar Master, yaitu Master of Industrial Engineering, University of New Haven.
- Fia mengawali karier sebagai di ExxonMobil pada tahun 2001-2003 sebagai Procurement Service Analyst.
- Pada tahun 2003-2015 Muchtasyar berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
- Tahun 2015-2016 Muchtasyar menjabat sebagai Chief Business Development Officer Bakrie Metal Industry.
- Pada 2019-2020 Muchtasyar berkarier sebagai Tenaga Ahli Kementerian Perhubungan.
- Tahun 2020 dia ditunjuk menjadi Direktur Pengembangan Usaha PT Rekayasa Industri.
- Pada 2021-2023 Muchtasyar ditunjuk sebagai Direktur PT Pertamina Gas Negara (PGN).
- Muchtasyar menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN tahun 2021-2023.
- 16 Januari-10 Februari 2025 menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.



Pegawai Kementerian Bantu Pemalsuan SHGB Pagar Laut Tangerang, Siapa?

JAKARTA- Bareskrim Polri menyatakan ada dugaan keterlibatan dari pegawai kementerian dan lembaga terkait di kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM wilayah pagar laut Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu dengan dicetak dan ditandatangani sendiri.

Surat palsu itulah yang kemudian digunakan oleh Kepala Desa Kohod dan lainnya untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

"Selanjutnya dengan bantuan dari beberapa oknum pada Kementerian dan Lembaga, terbitlah bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Di sisi lain, Djuhandhani mengatakan penyidik saat ini juga telah menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah kantor hingga rumah Kepala Desa Kohod Arsin.

Ia mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari tiga lokasi penggeledahan, pada Senin (10/2/2025) malam. Ketiga lokasi itu yakni Kantor Desa Kohod, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

"Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu," jelasnya.

Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang ke tahap penyidikan.

Melalui peningkatan status tersebut artinya penyidik telah menemukan unsur dugaan tindak pidana. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Kades Kohod Mangkir

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memanggil



TNI AL membongkar pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Selasa (11/2/2025). Foto: Dispenal

Kepala Desa Kohod Arsin untuk dimintai keterangannya soal pagar laut Tangerang, hari ini. "Memang ada pemanggilan untuk Kades Kohod, tapi ditunggu enggak hadir," kata Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, Selasa (11/2/2025).

Doni mengatakan agenda pemanggilan itu untuk memverifikasi keterangan pihak lain yang sebelumnya telah diperiksa. Pemeriksaan terhadap Kades Kohod, yang semestinya dilakukan hari ini, bersifat non-justisia.

Sebelumnya KKP telah memeriksa enam perangkat desa di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

"Update pemeriksaan lanjutan kasus pagar laut di Tangerang, ada enam perangkat desa dari lima wilayah memenuhi panggilan KKP," kata Doni.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penegakan sanksi administratif dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pemasangan pagar itu juga diduga melanggar PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021.

"Pada pemeriksaan yang

dilakukan Rabu, sejumlah orang dipanggil, yang terdiri dari perangkat desa dan pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah serta pemasangan pagar laut," ujarnya.

Enam perangkat desa yang hadir memenuhi panggilan KKP, yakni Kepala Desa Karang Serang, Kepala Desa Kronjo, Kepala Desa Tanjung Pasir, Kepala Desa Ketapang, Kepala Desa Lontar, dan Sekretaris Desa Kohod.

KKP juga memanggil mandor berinisial M yang diduga sebagai koordinator pemasangan pagar laut, namun dia tidak memenuhi panggilan. Meskipun alamat M telah ditemukan, keberadaannya masih belum diketahui, dan hingga kini masih dalam proses pencarian.

"Selain itu, dua orang lainnya, berinisial SW dan C dari kantor pengacara juga tidak hadir. Kontak mereka tidak dapat dihubungi, dan alamat domisili mereka belum terverifikasi," ujar Doni.

Sebagai tindak lanjut, KKP akan terus mencari ketiga orang yang belum memenuhi panggilan serta melakukan pemanggilan terhadap pihak lain yang dianggap mengetahui pemasangan atau pemilik pagar laut itu. (din, ist, rls/dya)

Wamenko Polkam: Ada 13 Penegak Hukum di Laut

WAMENKO Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan ada 13 lembaga penegak hukum untuk mengurus keamanan laut. Lodewijk mengusulkan dibentuknya satu aturan yang mengurus keamanan laut.

"Kemudian banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh UU dan, di antara 13 ini, 6 di antaranya punya armada, punya kapal," kata Lodewijk dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Nah, di sinilah, dengan punya wewenang-aturan dilindungi oleh undang-undang, yang keluar adalah ego sektoral masing-masing," tambahna.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar dibuat coast guard yang bertugas sebagai koordinator.

Politikus Golkar itu meyakini pimpinan coast guard nantinya mampu mengkoordinasi lembaga yang ada jika adanya peraturan yang mendasari.

"Kalau kita identifikasi persoalannya, sebenarnya kita harapkan ini kita harapkan artinya bagaimana koordinasi itu tegak. Pertanyaannya, kalau kita buat lembaga, ada 13 lembaga di situ yang berkaitan, apakah katakan kalau kita membuat coast guard, apakah ketua coast guard mampu mengkoordinir masalah itu?" ujar Lodewijk.

"Kalau kita sudah memberikan dia undang undang sebagai koordinator, seharusnya mampu," tambahna.

Lodewijk juga menilai kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Mantan Danjen Kopassus itu pun mengatakan selanjutnya akan bertindak tegas.

"Kenapa kok di laut berat banget, nggak bisa seperti ini. Nah, ini ada

dua kementerian yang berurusan itu. Percayalah, kami insyaallah kita tegas dengan yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyarankan dibentuknya satu regulasi khusus untuk mengatur penegakan hukum di laut, yakni rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.

"Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut, pertama, perlu dirumuskan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut," tuturnya.

Terkait pagar laut, TNI AL masih terus membongkar pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Per Selasa (11/2/2025), sepanjang 24,9 Km pagar laut berhasil dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan sejak pagi. Saat ini total sepanjang 30,16 Km pagar laut di wilayah Tangerang telah dibongkar dan tersisa 5,26 Km lagi. (din, ist, rls/dya)